

**STRATEGI PEMERINTAH DAERAH DALAM MENANGGULANGI
KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI KABUPATEN KETAPANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

Maychel Yoas Pandapotan Sinaga

NPP. 30.0893

*Asdaf Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat
Program Studi Manajemen Keamanan dan Keselamatan Publik
Fakultas Perlindungan Masyarakat*

Email: kekelnaga@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): Forest and land fires in Ketapang Regency occur every year with different levels of fire. Forest and land fires have a detrimental impact on the community and local government of Ketapang Regency. The forest and land fires that occurred in Ketapang Regency were caused by various factors ranging from people's habits, natural phenomena, and drought. **Purpose:** This study was conducted to find out how the Regional Disaster Management Agency's strategy to overcome forest and land fires in Ketapang Regency. **Method:** This study used a qualitative descriptive research. Researchers in this study used data collection techniques in the form of interviews, observation, and documentation. **Result:** The research was conducted using the Rangkuti theory which analyzes the strategy of the Regional Disaster Management Agency in tackling forest and land fires in Ketapang Regency using the SWOT analysis technique (Strength, Weakness, Opportunity, Threats). Based on the results of the SWOT analysis used by researchers to formulate a strategy for the Ketapang Regency by helping the community to make irrigation around the land, updating technology, expanding collaboration ties between agencies, increasing the number of human resources, and providing input to the government. **Conclusion:** A series of activities have been prepared and implemented in managing forest and land fire disasters in Ketapang Regency. The activities carried out by the Ketapang Regency have been good because they have been able to cope with forest and land fires. Several strategies need to be carried out by the Ketapang Regency to increase the success of forest and land fire disaster management in Ketapang Regency.

Keywords: Strategy; Forest and Land fires; Ketapang Regency

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Ketapang terjadi setiap tahun dengan tingkat kebakaran yang berbeda-beda, kebakaran hutan dan lahan menimbulkan dampak kerugian bagi masyarakat maupun pemerintah daerah Kabupaten Ketapang. Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kabupaten Ketapang ini disebabkan oleh berbagai faktor mulai dari kebiasaan masyarakat, fenomena alam, dan kekeringan. **Tujuan:** Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi Badan Penanggulangan Bencana dalam

menanggulangi bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Ketapang, Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. **Metode:** Peneliti dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Penelitian dilakukan dengan menggunakan teori Rangkuti yang menganalisis strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam menanggulangi kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ketapang menggunakan teknik analisis SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity, Threats*). Berdasarkan hasil analisis SWOT yang digunakan peneliti untuk merumuskan strategi bagi Kabupaten Ketapang yaitu membantu masyarakat membuat irigasi di sekitar lahan, memperbaharui teknologi, memperluas ikatan kerjasama antar instansi, menambah jumlah SDM, dan memberikan masukan kepada pemerintah. **Kesimpulan:** Serangkaian kegiatan telah disusun dan dilaksanakan dalam penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ketapang. Kegiatan yang dilakukan Kabupaten Ketapang sudah baik karena mampu menanggulangi bencana kebakaran hutan dan lahan. Beberapa strategi perlu dilakukan oleh Kabupaten Ketapang untuk perlu meningkatkan keberhasilan penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ketapang. **Kata kunci:** Strategi; Kebakaran Hutan dan Lahan; Kabupaten Ketapang

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Hutan memiliki peran sebagai tempat hidup bagi flora dan fauna serta sebagai penyuplai oksigen bagi keberlangsungan hidup dari makhluk hidup di bumi. Selain itu, hutan juga berfungsi untuk menyimpan, mengatur serta menjaga persediaan dan keseimbangan air pada saat musim hujan dan kemarau, menyuburkan tanah, mencegah terjadinya erosi ataupun tanah longsor juga menjaga keberlangsungan ekosistem. Hutan bisa menjadi tempat terjadinya suatu bencana, bencana merupakan suatu masalah yang menjadi ancaman bagi masyarakat karena dapat menyebabkan berbagai macam kerugian seperti kerugian ekonomi dan mengancam jiwa masyarakat. Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) merupakan salah satu bentuk dari bencana, bencana ini bisa disebabkan oleh alam dan atau manusia itu sendiri.

Karhutla di Indonesia telah menjadi permasalahan nasional yang tidak kunjung selesai. Karhutla terutama terjadi di daerah-daerah dengan tingkat kekeringan yang tinggi dan jenis tanah tertentu yang mudah terbakar. Daerah-daerah dengan jumlah titik api (*hotspot*) yang banyak adalah seperti Aceh, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Papua.

Salah satu daerah di Provinsi Kalimantan Barat yang memiliki banyak hutan adalah di Kabupaten Ketapang, potensi hutan yang ada di Kabupaten Ketapang dimanfaatkan oleh perusahaan dan masyarakat untuk digunakan menjadi lahan perkebunan dan pertanian seperti perkebunan kelapa sawit dan karet. Hal ini memicu dilakukannya pembakaran untuk membuka lahan dimana menjadi salah satu faktor terjadinya bencana karhutla. Setiap tahunnya Kabupaten Ketapang rawan terjadi insiden karhutla, Kabupaten Ketapang memiliki jumlah total 20 kecamatan, pada tahun 2021 peristiwa karhutla terjadi di Kecamatan Matan Hilir Selatan, Muara Pawan, dan Kendawangan. Karhutla ini dimulai pada tanggal 2 Februari 2021 hingga 18 Februari 2021 sudah ada 10,9 hektar lahan yang terbakar. Pada tahun 2022 karhutla kembali terjadi di Kecamatan Matan Hilir Selatan, dalam insiden ini setidaknya ada 1,84 hektar lahan yang terbakar.

Bencana karhutla yang terjadi di Kabupaten Ketapang memberikan banyak dampak yang merugikan bagi penduduk Kabupaten Ketapang dan daerah disekitarnya. Dampak tersebut berupa adanya kabut asap yang berbahaya bagi kesehatan manusia dan menghambat aktivitas masyarakat. Hal-hal

tersebut sering menuai protes dari masyarakat Kabupaten Ketapang dan sekitarnya sebab dampak kabut ini berlangsung hampir setiap tahun.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang dalam menanggulangi bencana karhutla adalah dengan meningkatkan kesiagaan terhadap bencana karhutla ketika memasuki musim kemarau dan melakukan patroli pada daerah-daerah yang memiliki titik api (*hotspot*) yang tinggi. Strategi lain dari yang masih direncanakan pemerintah daerah Kabupaten Ketapang adalah membangun menara pantau yang bisa digunakan untuk memantau titik api. Dan juga penggunaan *drone* dalam memantau titik api yang sulit untuk dijangkau oleh petugas. Meskipun berbagai strategi telah dilakukan, tingkat kejadian bencana karhutla di Kabupaten Ketapang masih kerap terjadi hampir setiap tahun. Penelitian ini perlu dilakukan untuk mengevaluasi serta meningkatkan strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang dalam menanggulangi bencana karhutla di Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam konteks bencana kebakaran hutan dan lahan maupun konteks strategi penanggulangan bencana. Penelitian Ary Junaidy dkk yang berjudul Mitigasi Bencana Kebakaran Lahan Gambut dengan Menggunakan Metode Alat Penggali Air Insitu dan Peran Serta Masyarakat di Desa Rimbo Panjang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, menemukan bahwa upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran lahan yang telah dilakukan masyarakat di Desa Rimbo Panjang, Kabupaten Kampar melalui ketersediaan air tanah di lahan gambut pada lokasi pembakaran lahan serta sistem pemadaman kebakaran yang cepat, tepat, dan akurat pada lokasi kebakaran. Perlu adanya peningkatan peran dan fungsi masyarakat peduli api (MPA) di lokasi kebakaran hutan dengan cara pemberian insentif agar kualitas pelayanan dan menemukan solusi dalam penyelenggaraan desa tangguh bencana kebakaran hutan dan lahan gambut (Junaidy dkk., 2019). Penelitian Harvikayana menemukan bahwa beberapa indikator berupa strategi organisasi dengan prinsip yang berbeda-beda tergantung otoritas lembaga pemerintahan terkait, strategi yang membentuk program dengan melibatkan beberapa *stakeholder* serta memperhatikan aspek preventif, mitigasi, dan kesiapsiagaan serta strategi sumber daya dengan melakukan pelatihan dan bimtek untuk meningkatkan kemampuan aparatur. Diperlukan koordinasi dan tindakan yang nyata serta kongkrit antara organisasi-organisasi yang bertanggung jawab terhadap kebakaran hutan dan atau lahan mulai dari tingkat provinsi hingga kelurahan/desa. (Harvikayana, 2020). Penelitian Jumani dan Bakrie menemukan bahwa faktor-faktor penyebab kebakaran lahan di Desa Purwajaya Kecamatan Loa Janan Kalimantan Timur yang disebabkan oleh faktor alam yaitu bahan bakar, topografi lahan, hidrologi, cuaca, iklim, dan rambu-rambu kebakaran serta faktor manusia seperti kelalaian dan ketidakpedulian masyarakat (Jumani & Bakrie, 2016).

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan merumuskan strategi dalam menanggulangi bencana kebakaran hutan dan lahan yang bisa digunakan BPBD untuk meminimalisir serta mencegah terjadinya bencana kebakaran hutan dan lahan. Penelitian yang dilakukan oleh Ary Junaidy, Ari Saddhyavitri, dan Muhammad Yusa (Junaidy dkk., 2019) lebih fokus pada kondisi tanah yang dapat menyebabkan suatu bencana kebakaran hutan dan lahan. Perbedaan dalam pemilihan subyek dimana penelitian

yang dilakukan oleh Dwi Harvikayana melibatkan beberapa *stakeholder* dalam proses penelitiannya (Harvikayana, 2020). Dan pada Penelitian yang dilakukan oleh Irwandi, Jumani, Ismail Bakrie memiliki perbedaan pada pemilihan memperoleh data primer dan data sekunder (Jumani & Bakrie, 2016).

Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang jelas, menganalisa, dan merancang strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang dalam menanggulangi kebakaran hutan dan lahan.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penggunaan penelitian deskriptif kualitatif dalam penelitian bertujuan untuk membantu menjelaskan dan mengetahui perilaku masyarakat di Kabupaten Ketapang dalam menanggapi bencana karhutla di Kabupaten Ketapang.

Penulis mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 9 orang informan yang terdiri dari kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), sekretaris, kepala sub bidang penyusunan program, kepala seksi tanggap darurat dan logistik, kepala seksi mitigasi, ketua tim pemadam kebakaran, dan kepala desa lokasi rawan bencana karhutla (dalam hal ini kepala desa sebagai objek penelitian sebanyak 3 orang). Adapun analisisnya menggunakan teori SWOT yang digagas oleh Freddy Rangkuty (Rangkuty, 2013) yang menyatakan bahwa untuk merumuskan strategi didasarkan pada logika memaksimalkan *Strength* (kekuatan) dan *Opportunities* (peluang) namun secara bersamaan dengan meminimalkan *Weakness* (kelemahan) dan *Threats* (ancaman).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis mendeskripsikan kegiatan, kendala yang dihadapi, serta strategi BPBD Kabupaten Ketapang dalam menanggulangi bencana kebakaran hutan dan lahan. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

3.1. Kegiatan BPBD Kabupaten Ketapang dalam Menanggulangi Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Ketapang melakukan berbagai kegiatan dalam proses penanggulangan bencana karhutla di Kabupaten Ketapang. Kegiatan yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Ketapang berpedoman pada peraturan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Penerimaan laporan tentang kejadian bencana merupakan salah satu prosedur BPBD dalam melakukan penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan. Pemberian laporan tentang kejadian bencana kebakaran hutan dan lahan dilakukan oleh masyarakat dan diterima oleh BPBD. Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa penerimaan laporan oleh BPBD mengenai kejadian bencana kebakaran hutan dan lahan tidak hanya diperoleh dari masyarakat, laporan mengenai titik api bisa juga didapat dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

BPBD Kabupaten Ketapang menajalankan tugas dan fungsinya dengan melakukan kegiatan sosialisasi. Berdasarkan wawancara, sosialisasi yang dilakukan bertujuan untuk menyadarkan

masyarakat Kabupaten Ketapang tentang bahaya bencana karhutla dan untuk meningkatkan sumber daya manusia sehingga terbentuk masyarakat Kabupaten Ketapang yang memahami cara mencegah terjadinya bencana karhutla.

Kegiatan yang dilakukan BPBD Kabupaten Ketapang ketika terjadi bencana kebakaran hutan dan lahan yaitu pemadaman kebakaran hutan dan lahan. Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui dalam melakukan kegiatan pemadaman karhutla, BPBD bekerjasama dengan masyarakat dalam proses pemadaman.

BPBD Kabupaten Ketapang melakukan tugas dan fungsinya dalam mencegah bencana kebakaran hutan dan lahan yaitu melakukan patroli. Berdasarkan hasil wawancara, pengawasan terhadap daerah rawan bencana kebakaran di Kabupaten Ketapang oleh BPBD merupakan suatu bentuk kegiatan penanggulangan bencana karhutla. Kegiatan ini dilakukan oleh BPBD dengan melakukan patroli ke tempat-tempat yang berpotensi dan sering terjadi karhutla, patroli dilakukan dengan mengerahkan personil/anggota BPBD.

3.2. Kendala BPBD Kabupaten Ketapang dalam Menanggulangi Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan

Penanggulangan bencana karhutla yang dilakukan BPBD mengalami kendala-kendala dalam pelaksanaannya. Kendala yang dihadapi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyebabkan terhambatnya proses penanggulangan bencana karhutla di kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat.

Berdasarkan observasi dan hasil wawancara dapat diketahui kendala yang dihadapi BPBD dalam menanggulangi bencana karhutla Sebagian besar hadir dari masyarakat, seperti kendala saat menerima laporan disebabkan kurangnya pengetahuan masyarakat, laporan yang tidak akurat dari masyarakat mengenai kejadian bencana karhutla, ketidakpedulian masyarakat mengenai bencana karhutla yang terjadi disekitar mereka, kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya mengikuti sosialisasi, tingkat pendidikan, suku, budaya, dan bahasa yang berbeda-beda menjadi pengaruh bagi BPBD dalam melaksanakan sosialisasi.

Selain itu kendala juga timbul dari lokasi karhutla yang jauh dan titik api yang terletak di tengah hutan serta kondisi jalan yang rusak yang dapat mempengaruhi personil BPBD untuk melakukan penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan yang terjadi. Kebijakan atau regulasi yang berlaku juga menjadi suatu kendala bagi BPBD Kabupaten Ketapang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk melakukan patroli atau pengawasan pada daerah tertentu, regulasi yang berlaku membatasi BPBD memanfaatkan penggunaan teknologinya dalam melakukan patroli atau pengawasan, teknologi yang terhambat pemanfaatannya yaitu penggunaan *drone* dimana pada area tertentu di Kabupaten Ketapang dilarang untuk diterbangkan.

3.3. Strategi BPBD Kabupaten Ketapang dalam Menanggulangi Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan

Dalam penelitian ini, penulis memperoleh data melalui observasi dan wawancara terkait *Strength* (kekuatan), *Weakness* (kelemahan), *Opportunities* (peluang), dan *Threats* (ancaman) yang dimiliki oleh BPBD Kabupaten Ketapang. Hal-hal tersebut kemudian dianalisis dan dibentuk strategi BPBD Kabupaten Ketapang dalam menanggulangi bencana kebakaran hutan dan lahan.

Kekuatan yang dimiliki oleh BPBD Kabupaten Ketapang antara lain dasar hukum yang kuat, reputasi kerja BPBD yang baik, relasi yang kuat dengan masyarakat, kompetensi sumber daya manusia, serta ketersediaan anggaran kebakaran hutan dan lahan. Kelemahan yang dimiliki oleh

BPBD Kabupaten Ketapang antara lain jumlah personil atau SDM yang terbatas, kurangnya pemberian edukasi ke masyarakat tentang karhutla, sarana operasional yang kurang memadai, kurangnya kerjasama antar instansi, serta lokasi kantor BPBD yang terletak dipusat kota. Peluang yang dimiliki oleh BPBD Kabupaten Ketapang antara lain dukungan dari pemerintah daerah, peran pihak swasta, perkembangan di bidang teknologi, masyarakat yang menjadi relawan, serta irigasi sungai yang digunakan masyarakat untuk berladang. Ancaman yang dimiliki oleh BPBD Kabupaten Ketapang antara lain hukuman atau sanksi yang tidak memberikan efek jera, fenomena alam yang mendukung terjadinya bencana kebakaran hutan dan lahan, ketidakpedulian masyarakat mengenai kebakaran hutan dan lahan, politik lokal yang dilakukan perusahaan kepada masyarakat, serta luasnya wilayah kebakaran hutan dan lahan.

Berdasarkan *Strength* (kekuatan), *Weakness* (kelemahan), *Opportunities* (peluang), dan *Threats* (ancaman) yang dimiliki oleh BPBD Kabupaten Ketapang maka kemudian penulis merumuskan strategi bagi BPBD Kabupaten Ketapang dalam menanggulangi bencana karhutla. Strategi SO (*Strength-Opportunities*) yaitu dengan membantu masyarakat membuat irigasi sungai disekitar lahan gambut serta memperbaharui teknologi terkini yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan. Selanjutnya strategi WO (*Weakness-Opportunities*) yaitu dengan membuat suatu aplikasi atau website dengan memanfaatkan teknologi guna menyadarkan masyarakat serta memperluas ikatan kerjasama dengan instansi yang berhubungan dalam mencegah serta menanggulangi karhutla. Strategi ST (*Strength-Threats*) yaitu dengan memberikan masukan kepada pemerintah daerah mengenai hukuman yang mengikat serta memberikan efek jera pada pelanggar serta mempersiapkan SDM yang dimiliki serta mengingatkan masyarakat ketika fenomena alam pendukung faktor karhutla akan terjadi. Kemudian strategi WT (*Weakness-Threats*) yaitu dengan membentuk posko-posko pelayanan BPBD di wilayah –wilayah yang jauh dari pusat kota guna mempercepat proses penanggulangan bencana di wilayah yang jauh dari pusat kota serta menambah jumlah personil BPBD sehingga sosialisasi dan pengawasan yang dilakukan dapat merata dengan mengirimkan personil tersebut ke beberapa wilayah di Kabupaten Ketapang.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Peneliti di lapangan menemukan bahwa BPBD Kabupaten Ketapang memiliki beberapa kekuatan internal yaitu dasar hukum yang kuat seperti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Reputasi kerja BPBD yang baik, relasi yang kuat dengan masyarakat, kompetensi sumber daya manusia, dan ketersediaan anggaran kebakaran hutan dan lahan, ketersediaan anggaran. Hal-hal ini selaras dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 Tentang Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan. Dalam pelaksanaan tugasnya, BPBD Kabupaten Ketapang memiliki beberapa kekurangan internal seperti jumlah personil atau SDM yang terbatas, kurangnya meratanya edukasi sehingga belum seluruh masyarakat mendapatkan informasi tentang karhutla, sarana operasional yang kurang memadai, kurangnya kerjasama antar instansi, dan lokasi kantor BPBD yang terletak dipusat kota. Pentingnya sarana operasional selaras dengan teori menurut Rohiyat (2012) “sarana dan prasarana adalah keseluruhan proses perencanaan, pengadaan pendayagunaan dan pengawasan sarana dan prasarana yang digunakan demi mencapai tujuan secara efektif dan jelas.” Peluang eksternal yang dimiliki BPBD Kabupaten Ketapang seperti dukungan dari pemerintah daerah yang selaras dengan diberlakukannya Peraturan Bupati Ketapang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Adanya

peran pihak swasta, perkembangan di bidang teknologi, masyarakat yang menjadi relawan, dan irigasi sungai yang digunakan masyarakat untuk berladang. Sementara itu beberapa faktor menjadi ancaman antara lain hukuman atau sanksi yang tidak memberikan efek jera, fenomena alam yang mendukung terjadinya bencana kebakaran hutan dan lahan, ketidakpedulian masyarakat mengenai kebakaran hutan dan lahan, politik lokal yang dilakukan perusahaan kepada masyarakat, luasnya wilayah kebakaran hutan dan lahan.

Berdasarkan temuan yang didapatkan peneliti di lapangan menjadi acuan dilakukannya teknik analisis SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity, Threats*), analisis SWOT yaitu dengan melihat kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dimiliki oleh BPBD Kabupaten Ketapang, yang selanjutnya digunakan untuk merumuskan suatu strategi terbaru yang dapat digunakan oleh BPBD Kabupaten Ketapang untuk mengendalikan bencana kebakaran hutan dan lahan yang terjadi.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa rangkaian kegiatan BPBD Kabupaten Ketapang dalam menanggulangi bencana kebakaran hutan dan lahan yaitu penerimaan laporan, sosialisasi, pemadaman, patroli dan pengawasan. Kegiatan yang dilakukan BPBD sudah baik karena mampu menanggulangi bencana kebakaran hutan dan lahan. Kendala-kendala BPBD Kabupaten Ketapang umumnya berasal dari faktor eksternal yaitu masyarakat, infrastruktur, jarak tempuh dan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Guna meningkatkan strategi penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan, BPBD Kabupaten Ketapang dapat membuat suatu aplikasi khusus mengenai BPBD Kabupaten Ketapang yang didalamnya mengandung informasi mengenai kejadian bencana, rutin menyelenggarakan pelatihan-pelatihan tentang penggunaan Ilmu Teknologi (IT) bagi personil BPBD, serta dapat memberikan saran bagi pemerintah daerah dalam menyusun prosedur pembakaran yang membiarkan masyarakat membuka lahan dengan cara dibakar secara bertahap dengan radius yang kecil, agar tradisi di masyarakat tetap bisa dilakukan dan api yang dihasilkan akan mudah dikendalikan.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Wawancara kepala desa juga hanya dilakukan pada tiga desa sebagai model studi kasus yang dipilih berdasarkan lokasi dengan tingkat kerawanan bencana kebakaran hutan dan lahan tertinggi di Kabupaten Ketapang.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan strategi penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ketapang untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala BPBD Kabupaten Ketapang beserta jajarannya, Kepala Desa Pelang, Kepala Sungai Besar, dan Kepala Desa Sungai Awan Kiri yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan menyukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Arikunto, S. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik Edisi Revisi VI*. Jakarta: Rineka Cipta
- Fitriana, Rina. 2008. *Mengenal Hutan*. Bandung: Putra Setia.
- J. Moleong, Lexy. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*, (Edisi Revisi). PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Kotler, Philip dan Keller, Kevin Lane. (2009). “*Manajemen Pemasaran, 13th Edition*”. Jakarta: Erlangga
- Mudrajad, Kuncoro. 2005. *Strategi Bagaimana Meraih Keunggulan Kompetitif*. Erlangga. Jakarta
- Priambodo SA. *Panduan Praktis Menghadapi Bencana*. Yogyakarta: Kanisus; 2009.
- Rachmat. 2014. *Manajemen Strategik*. Bandung: Pustaka Setia.
- Ramli, Soehatman. 2010. *Petunjuk Praktis Manajemen Kebakaran*. Jakarta: Dian Rakyat.
- Rangkuti, Freddy. 2013. *Teknik Membedah Kasus Bisnis Analisis SWOT Cara Perhitungan Bobot, Rating, dan OCAI*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Rangkuti, Freddy. 2017. *Teknik Membedah Kasus Bisnis Analisis SWOT Cara Perhitungan Bobot, Rating, dan OCAI*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Ritohardoyo, SU. 2002. *Perencanaan Dan Tata Guna Lahan*. Yogyakarta: Fakultas Geografi UGM.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Thoha. 2008. *Penggunaan Data Hotspot Untuk Monitoring Kebakaran Hutan*. Sumatera Utara: Departemen Kehutanan Fakultas Pertanian USU.
- Tjiptono, Fandy. 2000. *Strategi Bisnis Modern*. Edisi Pertama, Cetakan Pertama. Yogyakarta: Andi Offset.
- Winarno. 2013. *Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Isi, Strategi, dan Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.

2. Jurnal Ilmiah

- Harvikayana, Dwi. 2020. *Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Pengurangan Resiko Bencana Kebakaran Lahan Di Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang*. (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020).
- Muhammad Yusa, A. J. 2019. *Mitigasi Bencana Kebakaran Lahan Gambut dengan Menggunakan Metode Alat Penggali Air Insitu dan Peran Serta Masyarakat di Desa Rimbo Panjang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau*. Selodang Panjang: Jurnal Ilmiah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.
- National Fire Protection Association. 2002. *NFPA reporters guide to fire and NFPA to all about fire*. Diunduh dari <http://www.nfpa.org/news-andresearch/news-and-media/press-room/reporters-guide-to-fire-and-nfpa/allabout-fire>.

3. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 04/MEN/1980

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Peraturan Bupati Ketapang Nomor 17/ BPBD /2015 Tentang Pencegahan Dan Pengendalian Bahaya Kebakaran Di Kabupaten Ketapang

Peraturan Bupati Ketapang Nomor 37 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembakaran Terbatas dan Terkendali Pada Pertanian Dengan Sistem Berladang.

4. Sumber Lainnya

[https://www.batamnews.co.id/berita-53199-balapan-f1-singapura-terancam-batal-](https://www.batamnews.co.id/berita-53199-balapan-f1-singapura-terancam-batal-karena-kabut-asap.html)

[karena-kabut-asap.html](https://www.batamnews.co.id/berita-53199-balapan-f1-singapura-terancam-batal-karena-kabut-asap.html) *Balapan F1 Singapura Terancam Batal Karena Kabut Asap*. 16 September 2019.

[http://ditjenppi.menlhk.go.id/berita-ppi/3391-daops-manggala-agni-ketapang-waspada-](http://ditjenppi.menlhk.go.id/berita-ppi/3391-daops-manggala-agni-ketapang-waspada-menghadapi-musim-kemarau-tahun-2019.html)

[menghadapi-musim-kemarau-tahun-2019.html](http://ditjenppi.menlhk.go.id/berita-ppi/3391-daops-manggala-agni-ketapang-waspada-menghadapi-musim-kemarau-tahun-2019.html) *Daops Manggala Agni Ketapang Waspada Hadapi Musim Kemarau Tahun 2019*. 9 Juli 2019.

